

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM PERWAKAFAN TANAH DI KOTA SAMARINDA

Wakaf merupakan salah satu lembaga hukum Islam yang diterima oleh masyarakat. Diterimanya wakaf merupakan suatu yang wajar karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Mengingat akan arti pentingnya wakaf, pemerintah mengeluarkan suatu ketentuan khusus untuk memberikan kepastian hukum dan ketertiban perwakafan, terhadap wakaf tanah wajib di daftarkan sesuai Undang-undang No. 41 Tahun 2004, dan diperlukan peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf tersebut. Namun kenyataannya di Samarinda masih ada tanah wakaf yang menjadi tanah pribadi, akibat dari tidak didaftarkannya wakaf tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukumnya.

Tesis ini membahas tentang pelaksanaan pendaftaran tanah wakaf yang belum didaftarkan setelah berlakunya Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf serta peran PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran Tanah Wakaf yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 di kota Samarinda.

Lokasi Penelitian di dua kecamatan yaitu Kecamatan Samarinda Utara dan Palaran kota Samarinda. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan dengan jenis penelitian deskriptif analisis

Terhadap hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan perwakafan tanah di kecamatan Samarinda Utara sudah sesuai dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004, hal tersebut tidak terlepas dari peran PPAIW, wakif dan nadzir yang sudah paham akan arti pentingnya pendaftaran tanah wakaf. Pelaksanaan wakaf di palaran belum sesuai dengan Undang-Undang Wakaf terlihat dari masih ada tanah-tanah yang belum didaftarkan. Hal ini dikarenakan PPAIW di Palaran menganggap tugasnya sebagai PPAIW adalah eks officio atau jabatan otomatis yang tidak ada serah terima, pola pikir masyarakat yang menganggap mewakaf merupakan amal jariyah, selain itu para nadzir belum mengetahui tugas dan peranannya. Kendala-kendala yang lain adalah lokasi tanah wakaf yang sulit untuk dijangkau, biaya yang dikeluarkan sangat besar, prosedur yang sangat lama, membuat masyarakat enggan untuk mendaftarkannya.

Upaya mengatasi kendala perwakafan tersebut seperti Sosialisasi kepada para wakif, nadzir, tokoh agama, dan tokoh masyarakat tentang pentingnya sertifikasi tanah wakaf terutama mengenai Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Koordinasi diantara instansi yang berwenang terhadap sertifikasi tanah wakaf terutama instansi Kantor BPN bersama Kantor Kementerian Agama setempat yang membawahi KUA Kecamatan selaku PPAIW beserta Nadzir, agar pelaksanaan perwakafan bisa optimal, ditambah tenaga kerja yang khusus memahami tentang perwakafan, mengadakan PRONA untuk tanah wakaf yang belum didaftarkan.

Kata kunci : Wakaf, Pendaftaran, PPAIW

ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF ACT NUMBER 41, 2004 ON WAKAF IN ASSURING LEGAL ASSURANCE ON WAKAF LAND LAW IN SAMARINDA CITY

Wakaf is an Islamic law institution in Indonesia accepted by people. The Acceptance of wakaf is a common matter because most of Indonesian people are Moslems. Considering the importance of wakaf, government issued a special stipulation to provide legal assurance and wakaf order to wakaf lands in order to be registered according to the act number 41, 2004. in addition, the role of PPAIW is required in the implementation of wakaf land registration to assure the legal assurance. In Fact, In Samarinda there are wakaf lands turn into private lands because the lands were not registered. Therefore, they do not have legal assurance.

This Thesis discussed about the implementation of wakaf land registration which were not registration after the application of the Act number 41, 2004 of wakaf and the roles of PPAIW in the Implementation of wakaf land registration assured by the Act Number 41, 2004 in Samarinda City.

The research locations were in two sub districts, North Samarinda and Palaran, Samarinda City. The Methode applied was juridical approach with the research type of descriptive analytical.

The research results show that the implementation of wakaf land registration in the sub district of North Samarinda was in accordance with the act number 41, 2004. it was caused by the roles of PPAIW, wakif, Nadzir who understood the importance of wakaf land registration. The implementation of wakaf in Palaran was not in line with the wakaf law. It can be seen from the presence of unregistered wakaf lands. It was caused by PPAIW in Palaran considered their duties as PPAIW was *ex officio* or automatic position with no official transfer, peoples ways of thinking that considered wakaf is an *amal Jariyah* Besides, the Nadzir did not know their duties and roles, the wakaf land location was not easily accessed, high cost, and very long procedure. The problems caused people were reluctant to register the lands.

It is Important do conduct socialization to the wakif, nadzir, religious people, and public figures on the importance of wakaf land certification, particularly on the Act number 41, 2004 on Wakaf. In addition, the coordination among authorized institutions on wakaf land certification, particularly BPN Office with local religion Ministry organizing KUA of sub districts as PPAIW with the nadzirs is also important in order that the implementation of wakaf can be optimized supported by special personnel understanding wakaf matter. It is also necessary to carry out PRONA for unregistered wakaf land.

Keywords : Wakaf. Registration, PPAIW